



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WALUYO HANDOKO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUMAS**
3. NHK : **867397**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.010.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/200 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/280 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1008 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 448 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1319 m2/68 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 530.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI XL 7 415F GX AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY HB 1.5 L RSCVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BBP-A A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	426.790.482
F. HARTA LAINNYA	Rp.	250.000.000
Sub Total	Rp.	3.216.790.482
III. HUTANG	Rp.	33.609.650
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.183.180.832

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.